

KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik telah di susun dokumen rencana Strategis dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan visi dan misi Gubernur Jambi, Terwujudnya Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (Jambi Mantap) dengan Misi ke 3 (tiga) Memantapkan Kualitas SDM "MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI YANG DINAMIS"

Badan Kesatuan dan Politik memiliki peran penting dalam Menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya Provinsi Jambi dalam upaya mempertahankan Kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kehidupan demokrasi di Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah di daerah dibidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan, Penanganan konflik, Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja Ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Jambi, Januari 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Jambi

H. MUKTI, SE, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19701112 1999 03 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2022 berupa Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi dari Pemerintah Pusat Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Piagam Penghargaan Pembagian 1 Juta Bendera di Provinsi Jambi

Dasar: Surat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 005/5293/polpum tanggal 5 Agustus 2022.

Pelaksanaan: Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan Piagam Penghargaan berhasil mendukung program Kementerian Dalam Negeri Terkait Pembagian 1 Juta Bendera bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Jambi yang diikuti oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi.

2. Sertifikat Penghargaan Pembentukan Gugus Tugas di Daerah

Dasar: Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016

Pelaksanaan: Pemerintah Provinsi Jambi Mendapatkan Penghargaan berupa Piala Anugerah Revolusi Mental Indonesia Tahun 2022 karena telah berhasil mendukung program Pemerintah Pusat di karenakan Pemerintah Provinsi telah membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jambi dan juga telah berhasil mendorong hingga 100%

pembentukan gugus tugas pada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi.

3. PialaAnugrahRevolusiMentalIndonesiaTahun 2022

Dasar:IntruksiPresidenNomor12Tahun2016

Pelaksanaan: Pemerintah Provinsi Jambi Mendapatkan Penghargaan berupa Piala Anugrah Revolusi Mental Indonesia Tahun 2022 oleh Presiden melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (kemenko PMK) katagori Gerakan Indonesia Bersatu. Kerena Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mendukung program Pemerintah didaerah dalam Pengaplikasian kegiatan Indonesia Bersatu.

Badan KesatuanBangsa dan Politik Provinsi Jambi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun 2022 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara rinci akan dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sebesar Rp. 19.581.188.125,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sau Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Rp. 7.842.212.856,-(Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh EnamRupiah);
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.294.582.296,- (Enam milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
3. Belanja Hibah Rp.5.096.229.000,- (Lima Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 123.214.073,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Struktur Organisasi.....	3
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.3 Isu Strategis.....	15
1.4 Sumber Daya Aparatur.....	16
1.5 Sarana dan Prasarana.....	19
1.6 Keuangan.....	241
1.7 Sistematika Penyusunan LKj Tahun 2020.....	24
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 24
2.1 Perencanaan Strategis.....	24
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	24
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	26
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	31
3.3 Realisasi Anggaran.....	35
3.4 Laporan Hasil Kegiatan dan Realisasi Kegiatan T.A. 2022.....	51
 BAB IV PENUTUP.....	 61

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1Struktur Organisasi	4
Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai	17
Gambar.1.3 Golongan Ruang Pegawai	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai.....	16
Tabel 1.2 Golongan Ruang Pegawai.....	18
Tabel 1.3 Rekapitulasi Barang Inventaris	19
Tabel 1.4 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana	20
Tabel 1.5 Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	20
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	26
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026	27
Tabel 2.3 Formulir Perjanjian Kinerja OPD.....	28
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel 3.2 Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3.3 Capaian Kinerja 2020-2022	32
Tabel 3.4 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah.....	34
Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2022	36
Tabel 3.6 Data Organisasi Kemasyarakatan.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
2. Mendorong Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target

kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusunlah LKj Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5(lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara, khususnya sebagai upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran.

Tujuan dan Manfaat

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis 2021-2026 sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi, khususnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan sebagai penyajian data realisasi, baik data mengenai target maupun realisasi kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan Masyarakat). Kedua,

merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Kedudukan dan Dasar Hukum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

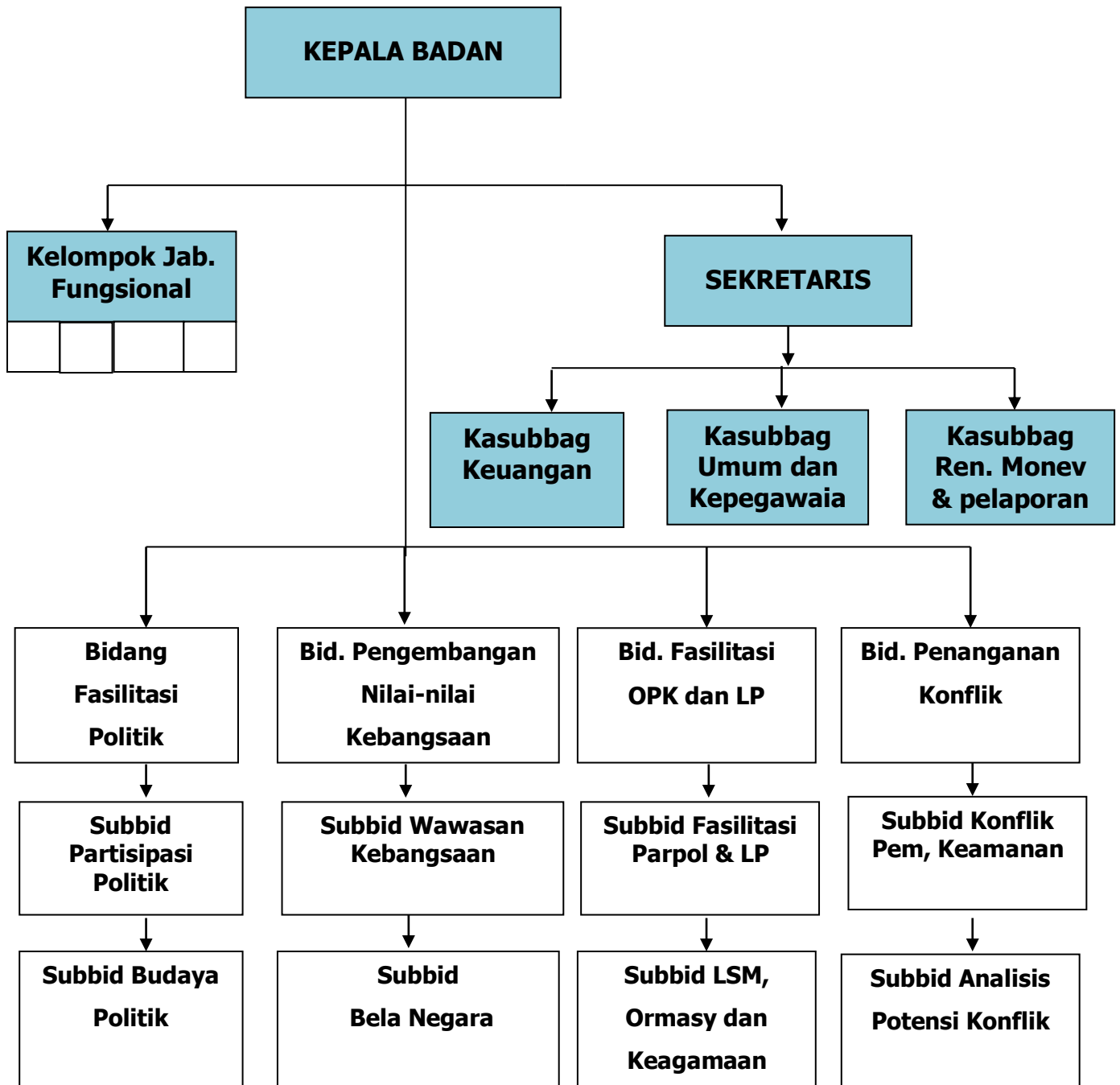
1.1 Struktur Organisasi

Sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Yaitu :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Partisipasi Politik.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan.
- e. Bidang Penanganan Konflik.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2008**



1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, maka tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 mengatur bahwa Sekretaris dan 4 (empat) Bidang sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008, masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi. Untuk dapat melaksanakan Tupoksi dimaksud, secara struktural dibantu oleh beberapa Sub Bagian/Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Membuat perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;

- c. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- d. Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat tata usaha pimpinan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, barang, perawatan dan pemeliharaan Inventaris Kantor;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas dan keamanan kantor;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan Badan Kesbangpol;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2 Sub Bagian Keuangan.

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran;
 - b. Melaksanakan penanganan administrasi keuangan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - d. Melaksanakan urusan kas dan gaji;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- (1) Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, mengsistimasi data dan penyusun rencana serta program kerja;
 - b. Menganalisa data hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan;
 - c. Menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesbangpol;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Bidang Partisipasi Politik

- (1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesbangpol di bidang Fasilitasi dan pengembangan, Partisipasi politik dan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi Pemilihan Umum;
 - c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan Sosialisasi Undang-undang politik;
 - d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;
 - e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Partisipasi Politik Terdiri dari :

2.1 Sub Bidang Partisipasi Politik

- (1) Sub Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;
 - c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sub Bidang Budaya Politik

- (1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang budaya politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perkuatan pengembangan wawasan kebangsaan, memfasilitasi dan pembinaan pembauran bangsa, meningkatkan kesadaran bela negara serta resapan ideologi Negara di kalangan masyarakat dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
 - b. Melaksanakan dan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di lingkungan masyarakat;
 - c. Melakukan peningkatan dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - d. Melakukan pemasyarakatan pembauran kebangsaan dalam rangka integrasi masyarakat;

- e. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

3.1 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan kewarganegaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - b. Melaksanakan kegiatan interaksi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembauran dan perekonomian;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2 Sub Bidang Bela Negara

- (1) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bela negara, ideologi dan kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara;
 - b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan ideologi dan kewaspadaan nasional;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

- 4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan.
 - (1) Bidang fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitasi organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan kebijakan, memfasilitasi dan pengawasan terhadap organisasi partai politik, kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi dan kemasyarakatan;
 - c. Melakukan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
 - d. Melakukan evaluasi, komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait organisasi politik, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
 - e. Memfasilitasi lembaga perwakilan;
 - f. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan organisasi kemasyarakatan dan politik;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan kebijakan perumusan dan fasilitasi partai politik dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga perwakilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan persiapan kebijakan perumusan fasilitasi partai politik, organisasi profesi dan lembaga perwakilan;
 - b. Melakukan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan parpol;
 - c. Melakukan evaluasi pengawasan berkaitan dengan kegiatan partai politik;
 - d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
 - e. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan organisasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2 Sub Bidang Organisasi Masyarakat , LSM dan Keagamaan.

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi dan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
 - b. Melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;

- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penanganan Konflik

- (1) Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol di bidang penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan analisis potensi konflik;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik;
 - c. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lalu lintas orang asing;
 - d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah;
 - e. Melaksanakan evaluasi, koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

5.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

- (1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan fasilitas analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Potensi Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dengan penanganan berbagai konflik sosial;
 - c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2 Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan Keamanan

- (1) Sub bidang konflik pemerintahan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik pemerintahan dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan kebijakan memfasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik pemerintahan dan keamanan.
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
 - c. Melaksanakan rekonsiliasi mentalitas masyarakat secara utuh guna menumbuh kembangkan kembali semangat kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Melakukan evaluasi dan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, dijumpai beberapa permasalahan berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa, Wilayah Provinsi Jambi terdiri dari Masyarakat yang Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik Nasional yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di Provinsi Jambi.

Isu-isu strategis yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Meningkatnya konflik sosial terutama konflik sengketa lahan di daerah Provinsi Jambi;
2. Iklim politik Nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak, menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme yang berimbas ke Provinsi Jambi.
3. Meningkatnya aksi penyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dan antisipasi bahaya aksi terorisme dan radikalisme di daerah Provinsi Jambi.
4. Dukungan Persiapan Pelaksanaan Pilkada & Pemilu Serentak Tahun 2024.
5. Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik.
6. Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkannya pendidikan politik masyarakat terutama pada pemilih pemula;
7. Fasilitasi bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim, yang mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat.
8. Melemahnya Pemahaman Terkait Nilai-nilai Pancasila, Karakter & Wasbang dlm Kehidupan Berbangsa, Bernegara & Bermasyarakat.

1.4. Sumber Daya Aparatur

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak (tujuh puluh tiga) orang. 51 (lima puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 32 (tiga puluh dua) orang tenaga honorer, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural 17 Orang.
2. Staf/Pelaksana 34 Orang.
3. Tenaga Honorer 32 Orang.

Secara keseluruhan komposisi jabatan, memuat susunan Struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Eselon I = - Orang
2. Eselon II = 1 Orang
3. Eselon III = 5 Orang
4. Eselon IV = 11 Orang
5. Non Eselon = 34 Orang

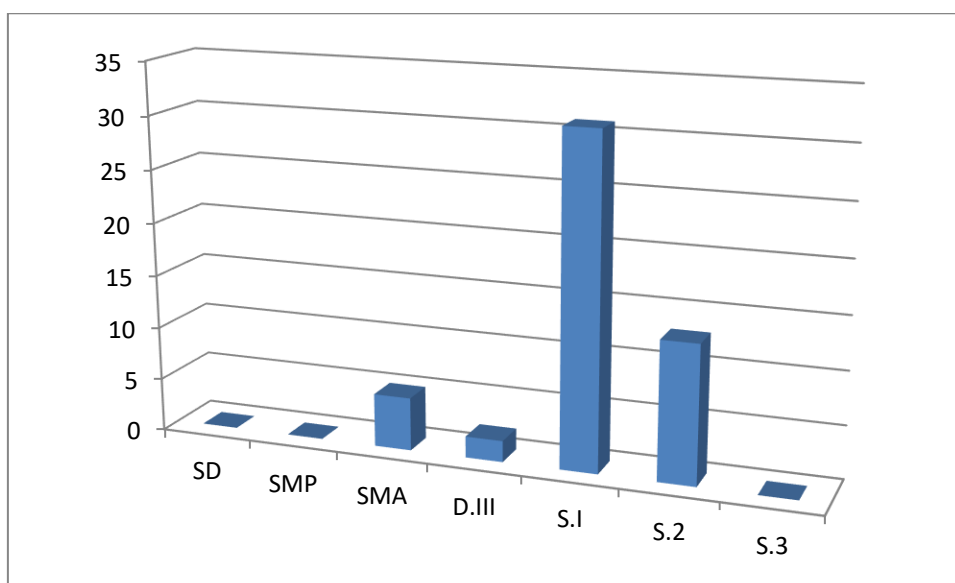
Tabel 1.1
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	SD	-	-	-
2	S L T P	-	-	-
3	S L T A	5 Orang	9,8 %	PNS Daerah
4	D.III	2 Orang	3,9 %	PNS Daerah
5	S.I	31 Orang	60,78 %	PNS Daerah
6	S.II	13 Orang	25,49 %	PNS Daerah
7	S.III	-	-	-
	Jumlah	51 Orang		

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol 60,78% pegawai sudah berpendidikan sarjana (S1), bahkan 25,49% lulusan Pasca Sarjana

(S2) dan 3,9% Diploma, namun sebanyak 9,8% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 1.2
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Tingkat Pendidikan

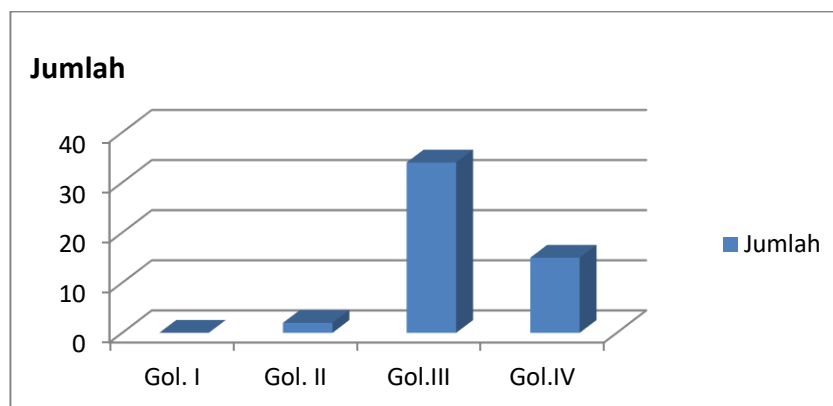


Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	I.c	-	-	-
4	I.d	-	-	-
5	II.a	-	-	-
6	II.b	1 Orang	1,64 %	PNS Daerah
7	II.c	-	-	-
8	II.d	1 Orang	4,92 %	PNS Daerah
9	III.a	4 Orang	8,20 %	PNS Daerah
10	III.b	5 Orang	13,11 %	PNS Daerah
11	III.c	8 Orang	19,61%	PNS Daerah
12	III.d	17 Orang	27,87 %	PNS Daerah
13	IV.a	4 Orang	6,56%	PNS Daerah
14	IV.b	10 Orang	18,03%	PNS Daerah
15	IV.c	1 Orang	1,60%	PNS Daerah
16	IV.d	-	-	-
17	IV.e	-	-	-
	Jumlah	51 Orang	-	-

Gambar 1.3
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Berdasarkan Golongan Ruang



1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan juga didukung oleh sumber daya sarana dan prasarana yang memadai, seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Barang Inventaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
(data Desember 2021)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				B	KB
I	Tanah dan Bangunan	1521	M2		
II	KENDARAAN :				
	1.Roda 2	14	UNIT	10	4
	2.Roda 4	8	UNIT	6	2
III	APK :				
	1.Lemari Kayu	25	BUAH	18	7
	2.Filling Kabinet	8	BUAH	5	3
	3.Papan Tulis	4	BUAH	4	-
	4.Kursi Putar	45	BUAH	37	8
	5.Kursi Biro	7	BUAH	7	-
	9.Meja Biro	14	BUAH	10	4
	10.Meja ½ Biro	40	BUAH	23	17
	11.Televisi	7	UNIT	7	-
	12.Bagan Struktur	1	BUAH	1	-
	13.Komputer (PC)	14	UNIT	11	3
	14.Laptop	12		8	4
	15.AC	23	UNIT	17	6
	16.Infocus	1	UNIT	1	-
	17.Printer	13	UNIT	10	3

Tabel 1.4
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pengadaan	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB	2022	
1	AC 2 Pk	2	-	2	2
2	AC 1 Pk	2	-	2	2
3	Filling Kabinet	2	-	2	2
4	Kursi Kantor	17	-	17	17
5	Pc Al In One	2	-	2	2
6	Laptop	2	-	2	2
7	Printer G4010	2	-	2	2
8	Printer Epson	2	-	2	2

Tabel 1.5
Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini		Jumlah Rencana Pemeliharaan 2022	Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	KB		
1	Minibus	8	6	8	8
2	Bangunan/Gedung Kantor	1	-	1	1
3	AC	17	6	23	23
4	PC (Komputer)	11	3	14	14
5	Printer	10	3	13	13

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi)

guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.581.188.125,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah). Yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sebesar Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Rp. 7.842.212.856,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.294.582.296,- (Enam milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
3. Belanja Hibah Rp. 5.096.229.000,- (Lima Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 123.214.073,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan.

1.7 Sistematisa Penyusunan LKj Tahun 2022

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan berdasarkan data hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2022, dan sesuai dengan Selain itu laporan ini bersumber dari pembiayaan yang bersifat Strategik yang dimaksudkan adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategik dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sementara itu dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tetapi tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2022 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas gambaran tentang latar belakang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jambi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi Kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA, Menjelaskan Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022, penyajian tabel perjanjian kinerja perangkat daerah. Perbedaan antara target kinerja pada rencana tahun 2022 dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA, Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selama Tahun 2022 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut serta menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2022.

BAB IV – PENUTUP, Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2022 atas capaian kinerjanya serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jambi merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik, perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan visi dan misi serta mempertahankan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategik yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran. Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan kesatuan dan politik Provinsi Jambi. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, inovatif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan suatu pernyataan mengenai gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai di masa depan suatu instansi pemerintah untuk dapat berkarya, tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk menajut citra yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2021 – 2026 adalah :

Visi :

**“TERWUJUDNYA JAMBI LEBIH MAJU, AMAN, NYAMAN,
TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO
ALLAH SWT, (JAMBI MANTAP)”**

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 antara lain:

MISIPERTAMA: Memantapkan Tata Kelola Pemerintah

Yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

MISIKEDUA : Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah Yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

MISIKETIGA : Memantapkan Kualitas SDM

Yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Ketiga misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Ketiga** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu: “**Memantapkan Kualitas SDM**”

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi tersebut di atas serta memecahkan permasalahan dalam menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu : "Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang dinamis"

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah
Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Jambi**

Visi : Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridha Allah SWT.			
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintah			
Misi 3 : Memantapkan kualitas SDM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis	Terwujudnya demokrasi yang dinamis	Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan.	Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh Agama, Masyarakat dan pemerintah.

Pada tabel diatas, telah tergambar dengan jelas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dijelaskan tujuan, sasaran, strategi dan arahkebijakan.

Misi 3 : yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kerukunan intra dan antar umat beragama, Indeks Aspek Kebebasan Sipil serta penguatan rencana aksi gangguan keamanan dalam Provinsi Jambi.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berikut target capaian selama 5 (lima) Tahun.

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Terwujudnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif	Indeks Aspek Hak-hak Politik	57,3	60,59	63,88	67,17	70,46	73,75
		Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	87,95	89,95	92,45	94,95	97,45	97,45

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi telah menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya situasi politik daerah yang Kondusif dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat.	Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	70,50%
2.	Meningkatnya kehidupan Demokrasi yang dinamis.	-Indeks Kebebasan Sipil -Persentase Ormas aktif -Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi	70% 50 % 60 %
3.	Meningkatnya pelayanan, akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKP)	85 % BB

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.538.293.485	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	713.357.160	APBD
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	921.000.000	APBD
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.782.737.400	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	636.000.000	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.989.800.000	APBD
Jumlah		19.581.188.125	

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAMBI

Jambi, Januari 2023
Pihak Pertama,
KEPALA BADAN

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H

H. Mukti, SE, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19701112 199903 1 002

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Dapat dijelaskan tidak ada perbedaan antara target kinerja pada Renja tahun 2022 dengan yang di Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatnya situasi politik daerah yang Kondusif dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat.	Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	70,50 %	70,50 %	100 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kehidupan Demokrasi yang dinamis.	-Indeks Kebebasan Sipil -Persentase Ormas aktif -Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi	70 % 50 % 60 %	70 % 50 % 60 %	100 % 100 % 100 %	Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
3.	Meningkatnya pelayanan, akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKP)	85 % BB	85 % BB	100 % 100 %	Sangat Baik Sangat Baik

Sumber : Badan Kesbangpol 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Jambi memiliki indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi . Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai 100%**) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 100 %.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Badan Kesbangpol Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 100 % . Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatnya situasi politik daerah yang Kondusif dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

Dengan indikator kinerjanya yakni Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja 2020-2022

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	70,46 %	70,50 %	70,50 %	70,50 %	100 %
2.	-Indeks Kebebasan Sipil	70 %	70 %	70 %	70 %	100 %
	-Persentase Ormas aktif	50 %	50 %	50 %	50 %	100 %
	-Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi	60 %	60 %	60 %	60 %	100 %
3.	- Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	85 %	85 %	85 %	100 %
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKP)	BB	BB	BB	BB	100 %

Sasaran ini dicapai melalui Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang operasionalisasinyadidukung oleh kegiatan-kegiatan:

1. Sosialisasi Undang-undang Politik.
2. Rapat Internal.
3. Rapat Tim Verifikasi.
4. Rapat Koordinasi Bidang Politik.

Sasaran #2: Meningkatnya kehidupan Demokrasi yang dinamis. Dengan indikator kinerjanya yakni ;

- Indeks Kebebasan Sipil
- Persentase Ormas aktif

- Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi

Sasaran ini dicapai melalui Program-Program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 6) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.4 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

No	Indikator	Awal Periode RPJMD 2021	CAPAIAN		TARGET 2022	Capaian s/d 2022 thd Target 2024 %
			2020	2021		
1.	Indeks Kebebasan Diskriminasi	93,47	93,47	93,47	93,60	90 %
2.	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3.	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75 %	75 %	75 %	85 %	85 %
4.	Persentase Pelaksanaan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	76 %	76 %	76 %	79 %	85 %
5.	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	78 %	78 %	78 %	78 %	80 %
6.	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	77 %	77 %	77 %	77 %	80 %
7.	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	85

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar Rp. 19.581.188.125,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Rp. 7.842.212.856,-(Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh EnamRupiah);
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.294.582.296,- (Enam milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
3. Belanja Hibah Rp.5.096.229.000,- (Lima Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 123.214.073,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Realisasi Anggaran secara keseluruhan **Rp 19.211.662.651 (98,11%)**.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	URAIAN (PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN)	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		TARGET KINERJA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KET
			2022	%	Jumlah	Satuan	2022	%	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	<i>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</i>								
	<i>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9.538.293.485	9.190.091.884	96	85	%	85	100	EFISIEN
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.210.060	244.678.437	97	100	%	100	100	EFISIEN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.200.000	83.704.300	99	11	dokumen	11	100	EFISIEN

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	167.010.060	160.974.137	96	12	lap	12	100	EFISIEN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.768.276.223	7.434.819.389	96	100	%	100	100	EFISIEN
	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.497.812.856	7.164.359.433	96	14	bulan	14	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	270.463.367	270.459.956	99,99	12	bln	12	100	EFISIEN
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.656.000	17.656.000	100	10	Org	10	100	EFISIEN
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.656.000	17.656.000	100	10	Org	10	100	EFISIEN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	628.444.299	624.202.870	99	100	%	100	100	EFISIEN
	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	175.804.236	174.643.624	99	12	bln	12	100	EFISIEN

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.550.000	46.543.000	94	12	bln	12	100	EFISIEN
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.446.000	42.387.000	99,86	12	bln	12	100	EFISIEN
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.081.496	14.081.496	100	12	media cetak	12	100	EFISIEN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.562.567	346.547.750	99,996	1	thn	1	100	EFISIEN
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.214.073	123.211.500	99,998	21	unit	21	100	EFISIEN
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.214.073	123.211.500	99,998	21	unit	21	100	EFISIEN
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.578.830	174.103.680	99,73	1	thn	1	100	EFISIEN
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.400.000	5.400.000	100	1	thn	1	100	EFISIEN

	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	119.335.264	119.333.274	99,998	1	thn	1	100	EFISIEN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.843.566	49.370.406	99,05	1	thn	1	100	EFISIEN
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.914.000	571.420.008	99,39	1	thn	1	100	EFISIEN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.880.000	226.610.000	98,58	1	thn	1	100	EFISIEN
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.800.000	78.800.000	100	1	thn	1	100	EFISIEN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	266.234.000	266.010.008	99,92	12	bln	12	100	EFISIEN

	Kantor atau Bangunan Lainnya								
II	<i>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</i>	<i>713.357.160</i>	<i>709.951.092</i>	<i>99</i>	<i>79</i>	<i>%</i>	<i>79</i>	<i>100</i>	<i>EFISIEN</i>
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	713.357.160	709.951.092	99	100	%	100	%	EFISIEN
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	287.365.000	285.211.582	99	210	peserta	210	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	425.992.160	424.739.510	99,71	9	kab/kota	9	100	EFISIEN

	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
III	<i>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</i>	5.782.737.400	5.781.117.768	99,97	77	%	77	100	EFISIEN
9	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.782.737.400	5.781.117.768	99,97	100	%	100	100	EFISIEN

03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.272.969.880	5.272.788.200	99,97	80	peserta	80	100	EFISIEN
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	446.495.340	445.067.222	99,68	6	kab/kota	6	100	EFISIEN

05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	63.272.180	63.262.346	99,984	6	kab/kota	6	100	EFISIEN
IV	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</i>	<i>921.000.000</i>	<i>918.357.532</i>	<i>99,71</i>	<i>95</i>	<i>%</i>	<i>95</i>	100	EFISIEN
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	921.000.000	918.357.532	99,71	95	%	95	100	EFISIEN

	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	137.150.000	136.385.866	99,44	168	ormas	168	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	668.650.000	666.895.833	99,74	60	ormas	60	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	115.200.000	115.075.833	99,89	53	Ormas	53	100	EFISIEN

V	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</i>	<i>636.000.080</i>	<i>632.997.914</i>	<i>99,53</i>	<i>85</i>	<i>%</i>	<i>85</i>	<i>100</i>	<i>EFISIEN</i>
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	636.000.080	632.997.914	99,53	31	%	31	100	EFISIEN
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.000.000	88.804.992	98,67	8	Program Kerja	8	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	506.000.000	504.197.342	99,64	12	dokumen	12	100	EFISIEN

	dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40.000.080	39.995.580	99,99	11	dokumen	11	100	EFISIEN
VI	<i>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</i>	<i>1.989.800.000</i>	<i>1.979.146.461</i>	<i>99,47</i>	<i>78</i>	<i>%</i>	<i>78</i>	<i>100</i>	<i>EFISIEN</i>
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.989.800.000	1.979.146.461	99,47	100	%	100	100	EFISIEN

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500.000.000	499.522.128	99,90	11	dokumen	11	100	EFISIEN
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	203.300.000	202.256.300	99,48	11	kab/kota	11	100	EFISIEN

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	286.500.000	286.418.033	99,97	8	kasus	8	100	EFISIEN
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.000.000.000	990.950.000	99	12	%	12	100	EFISIEN
JUMLAH		19.581.188.125	19.211.662.651	98,11				100	EFISIEN

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel di atas, kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah sesuai target, dengan tingkat efisiensi sebesar 100 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian strategis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

3.4 Laporan Hasil kegiatan dan Realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2022

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan pada Renstra Tahun 2021-2026, Indikator kinerja tersebut beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya Tahun 2022 dapat diuraikan dibawah ini :

Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome* antara yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik Renstra Tahun 2021-2026 Indikator kinerja sasaran strategik beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya diuraikan dibawah ini :

i. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan adanya hubungan kemitraan dan fasilitasi antara pelajar, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dimana dalam hubungan kemitraan itu harus sesuai dengan

nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam target indikator kinerja. Dana yang menunjang program ini bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar **Rp. 713.357.160,-**. Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 99,59% dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 709.951.092,-** dengan Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan antar ras, suku, etnis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang diadakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai salah satu wadah untuk menumbuhkembangkan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jambi. Melalui Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi FPK dalam meningkatkan cinta tanah air dan kebangsaan. Melalui forum ini diharapkan dapat menyamakan langkah persepsi dan pola pikir, pola sikap, pola tindak terhadap setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Guna menciptakan situasi aman, kondusif, tertib menuju Jambi MANTAP 2021-2026 dalam membangun Provinsi Jambi kedepan
- Pelaksanaan program pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Kesadaran Bela Negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara bagi generasi muda sehingga tumbuh rasa cinta tanah air dan patriotisme.

- Selanjutnya dilaksanakan rapat internal Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia dalam rangka Menyusun Strategi Kerja Untuk Meningkatkan Nilai capaian IDI Provinsi Jambi dengan jumlah peserta yang terdiri dari TNI, Polri, Akademisi, Aktivis/Mahasiswa, Media, Tokoh Agama, Intansi Vertikal, serta Para utusan OPD Pemerintah Provinsi Jambi terkait yang terdapat dalam SK Gubernur.

ii. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Program ini memiliki dana yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar Rp.5.782.737.400,-. Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 99,97% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.781.117.768,-. Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yaitu terwujudnya situasi politik daerah yang kondusif. Pelaksanaan kegiatan politik diaplikasikan dalam kegiatan pendidikan politik dikalangan masyarakat, partai politik, ormas, mahasiswa/i, dan pelajar terutama pemilih pemula dan aparatur guna terselenggaranya politik yang santun, sehat dan berkualitas, rapat koordinasi dan pemantauan situasi perkembangan politik serta kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-undang Politik.
2. Rapat Internal.
3. Rapat Tim Verifikasi.
4. Rapat Koordinasi Bidang Politik.

iii. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 2 sub kegiatan :

1. Pembinaan atau pengembangan SDM Pengurus Ormas

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintah memfasilitasi, memberdayakan serta meningkatkan sarana koordinasi dan konsolidasi dalam penanganan Organisasi Kemasyarakatan.

b. Tujuan

Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Ormas dan LSM, bertujuan:

- 1) Untuk memonitor dan mengevaluasi keberadaan serta permasalahan-permasalahan Organisasi Kemasyarakatan di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi;
- 2) Adanya pembaharuan database berkaitan dengan perubahan kepengurusan dan jumlah keberadaan Organisasi Kemasyarakatan secara berkesinambungan;
- 3) Terjalannya kemitraan antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- 4) Meningkatkan Partisipasi dan peran Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan dalam Negeri;
- 5) Terkelolanya hak dan kewajiban warga Negara dalam berserikat dan berkumpul;

1. Terciptanya kesadaran kolektif warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memantapkan empat pilar kebangsaanyaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
2. Menjadi sarana konsolidasi antar unit kerja pemerintah nasional dan daerah dalam penanganan masalah keormasan;
3. Menyamakan persepsi dalam merespon hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Organisasi Kemasyarakatan;
4. Memperoleh data dan informasi mengenai aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi;

Sasaran

Penanganan Organisasi Kemasyarakatan yang mendaftar pada Pemerintah (Badan Kesbangpol) Provinsi Jambi diharapkan dapat meningkatkan peran untuk memelihara Kesatuan Bangsa dalam bidang ideologi, Politik Ekonomi dan Sosial Budaya. Capaian keluaran yaitu tersusunnya Rekomendasi dan Dokumen Pelaporan dalam rangka Pemantauan, evaluasi, Fasilitasi dan Koordinasi Ormas

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Tabel 3.6 Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Provinsi Jambi tahun 2022

No	Provinsi/Kab/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Ket
1	Provinsi Jambi	338	110	448	

Pada tahun 2022 pengambilan syarat pendaftaran lebih kurang 55 Ormas dan yang mengembalikan persyaratan juga berjumlah 55 Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan Pembinaan dalam Bentuk Sosialisasi

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Ormas Pembinaan/ Pemberdayaan Ormas

Pelaksanaan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi/seminar/dialog dll, dimana tahun 2022 dilakukan 2 (dua) kali kegiatan di Provinsi Jambi dan 5 (lima) kali di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Dengan materi yang dipilih diantaranya tentang. Dengan tema :

1. “Peran dan Fungsi Ormas Dalam Pembangunan di Provinsi Jambi”
2. “Meningkatkan Kapasitas Ormas dan Evaluasi Kegiatan Ormas Tahun 2022.

Pemilihan materi ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tujuan dan fungsi ormas serta sinkronisasi visi dan misi Gubernur Jambi yaitu Jambi Mantap, (Maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan profesional).

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini dalam pelaksanaan adalah merangkum beberapa kegiatan sebelumnya dengan nama “*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*” adapun kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 636.000.080,- dengan realisasi Rp. 632.997.914,- atau 99,53% dari kegiatan ini sesuai dengan perencanaan sudah dilakukan beberapa diantaranya :

- a. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB

Forum ini sudah di fasilitasi dengan mengadakan Rakor yang dilaksanakan di Kota Jambi dengan peserta FKUB Se-provinsi Jambi dan Kementerian Agama.

Maksud dan Tujuan :

Menyampaikan Visi, misi dan persepsi dalam meningkatkan peran FKUB, Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dan dewan penasehat FKUB untuk mengfungsikan FKUB dalam menciptakan kerukunan Intern dan unsure umat beragama di Provinsi Jambi, Mengkoordinasikan Kerjasama pemerintah dan FKUB dan Mengevaluasi Program kerja FKUB tahun 2021 dan menyusun Program kerja Tahun 2022.

Tujuan :

Dengan terbentuknya FKUB baik di Provinsi maupun Kabupten/kota dapat meningkatkan kerjasama Pemerintah dan FKUB serta memperoleh Informasi untuk penyelesaian masalah kerukunan umat beragama di provinsi Jambi serta mengevaluasi program kerja FKUB.

Narasumber :

- Sekretaris Daerah
- Hasan Basri Agus di wakikan Bapak Ir. Sarasadin
- Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi

Kesimpulan

- b. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkotika Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan :**Maksud :**

Mengoptimalkan peran pemerintah Daerah (OPD) dalam pencegahan Narkotika serta memberi pemahaman tetang resiko Narkoba.

Tujuan :

Memberi pemahaman tetang resiko Narkoba bagi peserta.

Narasumber :

- Sekretaris Daerah diwakilkan asisten Administrasi Pemerintahan
- Dir Narkoba Kapolda Jambi
- Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
-

Kesimpulan

Provinsi Jambi Tahun Pada 2017 menduduki peringkat 4 Penyalahgunaan Narkotika, dan sekarang jambi berkurang menjadi peringkat 26 dan akan terus bekerja keras untuk memberantas Penyalahgunaan Narkotika sehingga Provinsi dapat terbebas dari Penyalahgunaan Narkotika.

Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Badan Kesbangpol yang menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2022.

Sosialisasi ini dilaksanakan merupakan tindakan Moril untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Penyalahgunaan Narkotika

Agar Peserta Sosialisasi dapat menyampaikan ke Kesbangpol bagaimana cara Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Badan Kesbangpol sangat mengharapkan masukan-masukan untuk Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika.

V. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

Pelaksanaan Program ini memiliki sasaran yaitu Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dengan total dana dalam Program ini berasal dari APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.989.800.000,- dengan di dukung Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 99,47% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.979.146.461,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan ini mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.1.989.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.979.146.461,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Adapun output dari kegiatan ini adalah deteksi dini, cegah dini, tangkal dini dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya Konflik di Provinsi Jambi sehingga tercipta rasa aman dan tenteram dilingkungan masyarakat, dengan kegiatan:

- a. **Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme** bagi Pelajar, Pemuda, Mahasiswa, Masyarakat dan pegiat media sosial dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang terdiri dari 4 (empat) kali pelaksana kegiatan sosialisasi.

b. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial.

- Rapat Internal Timdu.

Kegiatan Rapat Internal Timdu Provinsi Jambi dilaksanakan 6 kali dalam 1 tahun yang membahas langkah-langkah deteksi dini, cegah dini dan antisipasi dini dalam menjaring, menampung, menganalisis pelaporan informasi dari masyarakat mengenai berbagai potensi ancaman serta mengkoordinasikan dengan Instansi terkait di daerah (Provinsi Jambi) dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya secara dini. Dengan jumlah peserta 80 dengan peserta yang terdiri dari Timdu Provinsi dan di ikut sertakan Kabupaten/Kota serta pihak yang berkonflik

- Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Se Provinsi Jambi.

Rapat ini dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun dan juga membahas langkah-langkah deteksi dini, cegah dini dan antisipasi dini dalam menjaring, menampung, menganalisis pelaporan informasi dari masyarakat mengenai berbagai potensi ancaman serta mengkoordinasikan dengan Instansi terkait di daerah (Provinsi Jambi) dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya secara dini. Dengan jumlah peserta 80 dengan peserta yang terdiri dari Timdu Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi.

c. Kegiatan Pemantauan Orang Asing.

Kegiatan Pemantauan Orang Asing, dengan output pemantauan kegiatan orang asing, TKA, peneliti asing, kunjungan / lalu lintas orang asing di daerah, outcome berupa konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi dan kab/kota, dampak lalu lintas dan adanya pemantauan situasi keamanan dan ketenteraman kegiatan orang asing di 11 kab/kota dalam Provinsi Jambi. Merumuskan solusi pemecahan masalah sebagai bahan untuk direkomendasikan kepada gubernur Jambi dalam pengambilan kebijakan/keputusan dalam hal penanganan orang Asing. Diharapkan kedepan dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait diantaranya Dinas Sosial dan tenaga Kerja dan TIM PORA (Tim Pemantauan Orang Asing).

Pekerja asing di wilayah Provinsi Jambi bekerja pada di 11 Kab/Kota sesuai dengan Permendagri Nomor 49 dan 50 tahun 2010 tentang Pemantauan Orang Asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing di daerah dengan di laksanakan sebanyak 2 (kali) dalam 1 Tahun.

d. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokopimda).

Kegiatan ini di bagi 2 (dua) kegiatan ada rapat khusus Fokopimda Provinsi dan Fokopimda Provinsi dan Gabungan Kabupaten/Kota

- Rapat Fokopimda Provinsi dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali dalam 1 Tahun dengan peserta 40 Orang dengan peserta unsur masyarakat sesuai dengan Tema dan agenda Pembahasan.
- Rapat Fokopimda Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Rakorda) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 Tahun dengan peserta 120 Orang dengan peserta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota dan Para Perangkat daerah terkait.

Kesimpulan dan Kendala :

- Secara umum kegiatan bidang penanganan Konflik sudah telaksana sesuai rencana.

BAB IV

PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah telah berhasil melakukan berbagai program dalam upaya menetapkan dan mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat untuk menuju JambiMANTAP.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis”, dengan indikator Indeks Aspek Kebebasan Sipil, Persentase Ormas aktif, Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi, realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebesar 100%.
2. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti masih belum validnya tapal batas antar desa maupun kecamatan, dan tapal batas lahan baik punya perorangan maupun perusahaan yang cepat sekali menyulut konflik di masyarakat. Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti permasalahan tapal batas untuk diatur secara tegas yang dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Kebijakan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- a. Pemetaan potensi konflik serta peningkatan kerja sama antar sektor dengan TNI, Kepolisian, NGO, agar penanganan konflik menjadi lebih tepat dan persuasi.
- b. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan *evaluasi* capaian kinerja.
- c. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dapat tercapai.
- d. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar Balance Score Card (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective, internal process, financial perspective, dan learning and growth perspective*.
- e. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government.

Demikian Laporan kinerja (LKj) Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2022, pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dapat dipertahankan untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasa yang akan datang.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI

H. MUKTI, SE, ME
Pembina Utama Muda
Nip. 19701112 199903 1 002